



**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**
(Survey Pada Desa Di Kabupaten Banggai)

Oleh:
Ririn Apriani M. Nur¹

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Luwuk
Email: ririnapriananur@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is; 1) To test and analyze the effect of the Accounting System and Government Internal Control System (SPIP) simultaneously on the Management of Village Fund Allocation (ADD); 2) To partially test and analyze the influence of the Accounting System on Village Fund Allocation Management (ADD); and 3) To test and analyze the effect of the Government Internal Control System (SPIP) partially on the Management of Village Fund Allocation (ADD). This type of research used in this research is descriptive research type with a quantitative approach, the data collection techniques in this study through the distribution of questionnaires and documentation. With the method of data analysis through multiple linear regression analysis. From the research results, it is known that the results of the simultaneous test show the two dependent variables, in this case the Accounting System and the Government Internal Control System (SPIP) together have a strong influence in determining the good or bad Village Financial Management in several villages in Banggai Regency , then the partial test results show that the Accounting System variable can independently influence the Village Financial Management in several villages in Banggai Regency. In the partial test, the Government Internal Control System (SPIP) separately is also able to influence the Village Financial Management in several villages in Banggai Regency.

Keywords: Accounting System, Government Internal Control System, Village Financial Management.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah; 1) Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara simultan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ; 2) Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Sistem Akuntansi secara parsial terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ; dan 3) Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara parsial terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui kegiatan penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Dengan metode analisis data melalui analisis regresi linear berganda. Dari hasil penelitian peneliti diketahui bahwa dari hasil uji simultan menunjukkan kedua variabel dependen yang dalam hal ini Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan baik atau buruknya Pengelolaan Keuangan Desa pada beberapa desa di Kabupaten

Banggai, selanjutnya pada hasil uji parsial menunjukkan variabel Sistem Akuntansi secara terpisah mampu mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa pada beberapa desa di Kabupaten Banggai, Pada uji parsial, sementara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terpisah juga mampu mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa pada beberapa desa di Kabupaten Banggai.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Desa.

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran berdampak baik untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, karena tata kelola Dana Desa dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut jelas memperlihatkan tingkat prestasi kerja Pemerintah Desa dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya, membangun kepercayaan masyarakat, mencegah terjadinya upaya penyalahgunaan keuangan desa, dan memacu percepatan tercapainya pembangunan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Salah satu kasus pengelolaan ADD yang berjalan kurang maksimal terjadi di beberapa desa di Kabupaten Banggai, dimana pengelolaan ADD di beberapa desa di wilayah tersebut tidak berjalan dengan semestinya, bahkan di beberapa desa terjadi kekisruhan antar pejabat desa yang juga ikut melibatkan masyarakat desa akibat buruknya tata kelola ADD, di beberapa kasus Kepala Desa didesak oleh warganya untuk mengundurkan diri, yang mana Kades tersebut dituding melakukan penyelewengan anggaran ADD, saat di interview para Kades tersebut meyakini bahwa kejadian tersebut merupakan ulah perangkat desanya yang memalsukan dokumen atas nama dirinya dan penyaluran dana yang dilakukan secara tidak langsung melainkan diwakili oleh perangkatnya yaitu Sekdes, sehingga dampak dari keberadaan Dana Desa tersebut tidak dirasakan oleh warga. Selain itu, tim pelaksana desa kadang terlambat dalam menyetorkan laporan penggunaan ADD bulanan, seperti progres implementasi program serta penggunaan dana dengan memanfaatkan draft yang telah ditetapkan, selain itu dalam proses pencairan ADD kadang pula lamban dalam menyetorkan laporan perkembangan fisik yang merupakan gambaran perkembangan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan di Kabupaten Banggai.

Masalah-masalah yang dikemukakan tersebut merupakan gambaran atas lemahnya penyelenggaraan pengelolaan ADD dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran, hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa aspek, yang mana sejauh ini peneliti menduga bahwa sistem akuntansi yang tidak berjalan baik menjadi penyebab lemahnya penyelenggaraan pengelolaan ADD di beberapa desa di Kabupaten Banggai.

Sistem Akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa adalah kumpulan fasilitas atau alat yang dirancang untuk digunakan dalam merubah data-data keuangan menjadi informasi, informasi ini dikomunikasikan pengelola keuangan desa kepada stakeholder beserta bukti data yang akurat

sebagai dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Pelaksanaan sistem akuntansi yang baik, dapat mendorong lembaga pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Banggai untuk dapat melakukan proses penyaluran data keuangan melalui informasi dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung tata kelola keuangan desa dengan hasil yang lebih baik. Namun dari hasil pengamatan, peneliti melihat bahwa masih banyaknya laporan keuangan yang unreliable, pihak Pemerintah Desa kurang memperhatikan rincian anggaran yang digunakan, sehingga banyak rekam transaksi yang tidak sesuai dengan laporan keuangan yang diajukan, dalam setiap laporan keuangan yang diajukan banyak ditemukan kejanggalan informasi yang dihasilkan tidak akurat.

Selain Sistem Akuntansi, lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi penyebab lemahnya penyelenggaraan pengelolaan ADD di beberapa desa di Kabupaten Banggai. Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintah agar setiap elemen yang ada dalam pemerintahan memiliki suatu aturan yang tersusun dan terorganisir dengan baik. Dari sumber yang didapatkan dari Tim Fasilitasi Kecamatan, pada beberapa desa di Kabupaten Banggai ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern serta pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan, tentu ini menunjukkan bahwa pengendalian intern pemerintahan desa di Kabupaten Banggai masih jauh dari apa yang diharapkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tidak tau atas temuan BPK atas hasil audit tanggal 10 Juni 2016 terhadap 3 desa di Kabupaten Banggai yang tidak dapat dipertanggung jawabkan masuk dalam temuan BPK. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal desa 27 poin A yang menyatakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggara pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota. Namun dari hasil temuan BPK terkait penggunaan Dana Desa tidak dapat dipantau, sehingga berpotensi tidak sesuai dengan peruntukannya. Kepala DPMD Banggai, mengaku dirinya tidak pernah tahu, soal adanya temuan BPK terhadap desa yang dimaksud dalam laporan hasil audit tersebut.

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, mengingat bahwa pentingnya pelaksanaan sistem akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Sistem Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Survey Pada Desa Di Kabupaten Banggai)”.

TELAAH PUSTAKA

Sistem akuntansi dapat diartikan sebagai kumpulan formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan untuk mengolah data dalam suatu usaha dimana melalui pengolahan data tersebut dapat dihasilkan umpan balik berupa laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Carls, Warren, M. James Reeve & Philips E. Fess (2005), mengemukakan “sistem akuntansi (*accounting system*) adalah metode dan prosedur, untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan. Sedangkan menurut Suwardjono (2003), “sistem akuntansi (*accounting system*) mempelajari berbagai rancang bangun (*design*) prosedur-prosedur untuk pengumpulan, penciptaan, dan pelaporan data akuntansi yang paling sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan tertentu”.

Kemudian menurut Mulyadi (2013), mengemukakan lima unsur yang menjadi pada sistem akuntansi, yaitu :

1. Formulir
2. Jurnal
3. Buku Besar
4. Buku Pembantu
5. Laporan

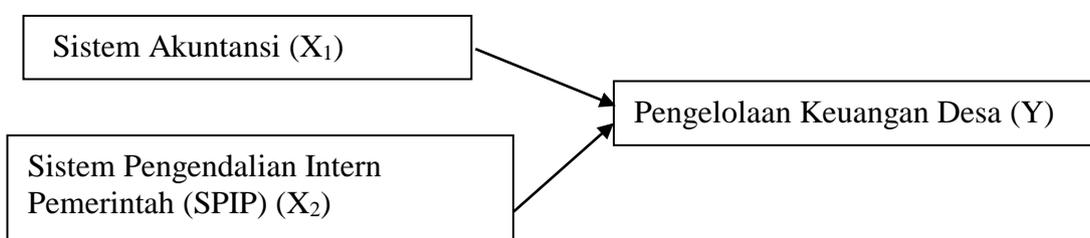
Menurut Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 ayat 1 dan 2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP. SPIP yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian beberapa unsur pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian Pimpinan
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pimpinan

Menurut Sutrisno (2009), “manajemen keuangan adalah semua aktifitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien”. Sedangkan dalam bukunya, Dwiyanto dalam Halim (2012), menyatakan bahwa pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Untuk memudahkan kegiatan yang akan dilakukan serta memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, maka kerangka variabel dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan kerangka di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2) secara simultan memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y).
2. Sistem Akuntansi (X_1) secara parsial memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y).
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2) secara parsial memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Rencana penelitian akan dilakukan sejak diterbitkannya SK penelitian yang dikeluarkan oleh pihak Universitas Tadulako. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pengaruh pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada beberapa di Kabupaten Banggai.

Dalam penelitian ini populasinya adalah para Aparatur Pemerintah Desa yang ada diwilayah Kabupaten Banggai. Dari hasil survey saat ini terdapat 291 Desa dari 23 Kecamatan di Kabupaten Banggai. Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu jumlah seluruh Aparatur Pemerintah Desa yang ada diwilayah Kabupaten Banggai sebanyak 3.783 aparatur desa dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik *Slovin*. Berdasarkan hasil perhitungan, sampel di dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 99 orang responden. Sementara untuk tentik penentuan sampel, maka digunakan teknik *purposive sampling*.

Dalam melakukan pengumpulan data, pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, antara lain

a. Penggunaan Kuesioner

Kuesioner pada penelitian ini menguraikan beberapa pertanyaan ataupun pernyataan yang berhubungan dengan variabel yang telah diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengidentifikasi, serta menganalisis literatur, laporan penelitian, dokumen-dokumen tertulis serta sumber bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Adapun teknik analisis datanya ialah menggunakan analisis deskriptif presentase, dan Koefisien Determinasi (R^2).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Hasil Uji Statistik

Berdasarkan hasil rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel Sistem Akuntansi (X_1) yang terdiri atas 15 (lima belas) indikator, peneliti memperoleh data dengan rata-rata (*mean*) tertinggi yaitu pada indikator “Bendahara Desa melakukan rekam transaksi melalui faktur penjualan” dan “Membuat laporan laba/rugi”, dengan masing-masing mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sama, yakni sebesar 3,54. Sementara itu, terdapat pula indikator dengan rata-rata (*mean*) terendah, indikator tersebut ialah “Mengumpulkan rekening-rekening yang merupakan rincian dari suatu rekening dalam buku besar”, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 3,08. Sementara itu secara keseluruhan pada variabel ini diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,38, sehingga dari hasil perhitungan tersebut jelas menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi (X_1) berada pada interval 2,61 – 3,40 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi sedang.

Pada hasil rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2), peneliti memperoleh data *mean* tertinggi yaitu pada indikator “Auditor mengarahkan kembali pada jalur yang tepat saat ditemukan penyimpangan”, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,47. Sementara itu, terdapat pula indikator dengan rata-rata (*mean*) terendah, indikator tersebut ialah “Pimpinan mengidentifikasi informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat”, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 2,99. Sementara itu secara keseluruhan pada variabel ini diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,33, sehingga dari hasil perhitungan tersebut jelas menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2) berada pada interval 2,61 – 3,40 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi sedang.

Hasil rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y) yang terdiri atas 12 (dua belas) indikator, peneliti memperoleh data dengan rata-rata (*mean*) tertinggi yaitu pada indikator “Memberikan peluang kepada semua kalangan untuk mengemukakan pendapat”, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,47. Sementara itu, terdapat pula indikator dengan rata-rata (*mean*) terendah, indikator tersebut ialah “Pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 3,32. Sementara itu secara keseluruhan pada variabel ini diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,41, sehingga dari hasil

perhitungan tersebut jelas menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y) berada pada interval 3,41 – 4,20 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi tinggi.

2. Hasil Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel Sistem Akuntansi (X₁) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X₂) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) sebagai variabel terikat. Adapun hasil regresi pada penelitian ini dapat dilihat pada gambaran tabel berikut:

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.475	7.648		-0.324	0.747
	Sistem Akuntansi	0.452	0.120	0.333	3.767	0.000
	SPIP	0.409	0.103	0.352	3.983	0.000

a. *Dependent Variable* : Pengelolaan Keuangan Desa

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = -2.475 + 2,076 + 1,302$$

Dari bentuk penjabaran di atas, menunjukkan bahwa variabel independen yang dianalisis yaitu variabel Sistem Akuntansi (X₁) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X₂), terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Lebih jelasnya penjelasan bentuk persamaan tersebut dapat dilihat berikut ini :

1. Konstanta sebesar -2.475, yang menggambarkan bahwa nilai konstanta bernilai negatif. Artinya jika skor variabel Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dianggap tidak ada atau sama dengan nol, maka skor Pengelolaan Keuangan Desa akan semakin berkurang.
2. Koefisien regresi variabel Sistem Akuntansi sebesar 0.452, yang menunjukkan bahwa koefisien variabel Sistem Akuntansi bernilai positif. Artinya apabila variabel Sistem Akuntansi ditingkatkan 1 satuan, maka variabel Pengelolaan Keuangan Desa mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,452. Apabila Sistem Akuntansi lebih sering dilakukan bisa jadi Pengelolaan Keuangan Desa pada beberapa desa di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah akan meningkat.
3. Koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 0.409, yang menunjukkan bahwa koefisien variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bernilai positif. Artinya apabila variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

ditingkatkan 1 satuan, maka variabel Pengelolaan Keuangan Desa mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,409. Apabila Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lebih sering dilakukan bisa jadi Pengelolaan Keuangan Desa pada beberapa desa di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah akan meningkat. Begitu sebaliknya, semakin rendah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) maka akan semakin menurun pula Pengelolaan Keuangan Desa pada beberapa desa di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

3. Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Untuk menguji pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama antara variabel pengawasan yang terdiri dari Sistem Akuntansi (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y), maka akan diuji dengan menggunakan uji F atau uji serempak, dengan melakukan perbandingan nilai F hitung dan F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel (3,09) pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) maka memberikan pengaruh secara bermakna terhadap variabel terikat. Hasil pengujian regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut:

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	670.927	2	335.464	16.357	.000 ^b
	Residual	1968.851	96	20.509		
	Total	2639.778	98			
a. <i>Dependent Variable</i> : Pengelolaan Keuangan Desa						
b. <i>Predictors</i> : (Constant), SPIP, Sistem_Akuntansi						

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 16,357 > F tabel (3,09) pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$), maka dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, dan dengan demikian terbukti bahwa semua variabel independen dalam hal ini Sistem Akuntansi (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2) yang diamati secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yakni Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

4. Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel Sistem Akuntansi (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) maka dilakukan uji parsial. Pengujian dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, jika t hitung lebih besar dari t tabel yang telah ditentukan maka secara parsial variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.475	7.648		-0.324	0.747
	Sistem Akuntansi	0.452	0.120	0.333	3.767	0.000
	SPIP	0.409	0.103	0.352	3.983	0.000

a. *Dependent Variable* : Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun hasil dari uji parsial atas hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada variabel Sistem Akuntansi (X_1), dari hasil analisis data diperoleh nilai t hitung sebesar 3,767 sehingga nilai tersebut dianggap lebih besar dari nilai t tabel yakni sebesar 1,664. Atas dasar ini dinyatakan bahwa H_a diterima dan terbukti bahwa menentukan standar atau dasar bagi Sistem Akuntansi (X_1) yang diamati secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y).
2. Pada variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2), dari hasil analisis data diperoleh nilai t hitung sebesar 3.983 sehingga nilai tersebut dianggap lebih besar dari nilai t tabel yakni sebesar 1,664. Atas dasar ini dinyatakan bahwa H_a diterima dan terbukti bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2) yang diamati secara parsial memiliki pengaruh pada variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel X (Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)) terhadap variabel Y (Pengelolaan Keuangan Desa), dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditentukan, jadi koefisien determinasinya adalah sebagai berikut:

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.504 ^a	0.254	0.239	4.529

a. *Predictors* : (Constant), SPIP, Sistem Akuntansi

b. *Dependent Variable* : Pengelolaan Keuangan Desa

$$\begin{aligned}
 Kd &= r^2 \times 100\% \\
 &= (0,504)^2 \times 100\% \\
 &= 0.254016 \times 100\% \\
 &= 25,40\%
 \end{aligned}$$

Hasil output SPSS pada tabel di atas menunjukkan bahwa *R square* sebesar 0.239 dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,504. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel Sistem Akuntansi (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) memiliki pengaruh dengan nilai sebesar 25,40%, sedangkan sisanya sebesar 74,60% dipengaruhi oleh faktor lain.

IV. PEMBAHASAN

Upaya nyata guna mengimplementasikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ialah dengan melakukan upaya penataan pengelolaan keuangan dengan lebih mengedepankan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana yang telah tertuang di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun dalam perjalanannya, kadangkala pengelolaan keuangan desa harus menghadapi beberapa masalah, seperti adanya masalah keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam menyampaikan laporan keuangan desa, hingga adanya kasus penyalahgunaan keuangan desa. Seperti halnya yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Banggai, pengelolaan ADD pada beberapa desa di wilayah tersebut tidak berjalan dengan semestinya, sehingga mengakibatkan terjadinya kekisruhan antar pejabat desa yang juga ikut melibatkan masyarakat desa akibat buruknya tata kelola ADD di beberapa desa di wilayah tersebut, tentunya hal tersebut merupakan gambaran atas lemahnya penyelenggaraan pengelolaan ADD, dimana hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti sistem akuntansi yang tidak berjalan baik serta lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengaruh kedua variabel ini terhadap pengelolaan keuangan desa amat penting dalam mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang mengedepankan transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Terkait adanya pengaruh Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa seperti halnya ADD pada beberapa desa di Kabupaten Banggai terbukti dari hasil uji hipotesis, yang mana pada uji F (uji simultan) menunjukkan bahwa kedua variabel dependen yakni Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan baik atau buruknya Pengelolaan Keuangan Desa seperti halnya ADD pada beberapa desa di Kabupaten Banggai. Yang mana pada hasil analisis membuktikan bahwa nilai F hitung yang diperoleh dari hasil analisis sebesar 16,357, jelas nilai ini lebih besar dibandingkan nilai F tabel yang sebesar 3,09 pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$), maka dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima, karena jelas terbukti bahwa semua variabel independen dalam hal ini Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diamati secara serempak berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen dalam hal ini adalah terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga kedua variabel dependen ini patut diperhitungkan sebagai bagian penting yang turut memberikan pengaruh terhadap baik atau buruknya kualitas Pengelolaan Keuangan Desa yang dalam hal ini ialah ADD di beberapa desa di Kabupaten Banggai.

Bahkan secara parsial, kedua variabel memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana variabel Sistem Akuntansi secara terpisah mampu mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa di beberapa desa di Kabupaten Banggai, yang mana pada hasil analisis yang memperlihatkan bahwa nilai t hitung pada variabel ini sebesar 3,767, jelas nilai tersebut dianggap lebih besar dari nilai t tabel yang telah ditentukan yakni 1,664. Maka dengan demikian, atas dasar ini dinyatakan bahwa hipotesis pada penelitian ini dapat diterima.

Pada variabel dependen lainnya yakni Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terpisah juga mampu mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa di beberapa desa di Kabupaten Banggai, pada hasil analisis menunjukkan nilai t yang diperoleh variabel ini ialah sebesar 3.983, jelas saja nilai ini dianggap lebih besar dari nilai t tabel (1,664). Maka atas hasil tersebut dinyatakan bahwa hipotesis pada penelitian ini dapat diterima karena terbukti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara parsial mampu memberikan berpengaruh yang berarti terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Desa.

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Pengaruh Sistem Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada beberapa desa di Kabupaten Banggai, maka peneliti mengambil kesimpulan yang berdasarkan pemaparan hasil dan bahasan pada bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil uji simultan menunjukkan bahwa kedua variabel dependen yang dalam hal ini Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan baik atau buruknya Pengelolaan Keuangan Desa seperti halnya ADD pada beberapa desa di Kabupaten Banggai.
2. Sementara pada hasil uji parsial, variabel Sistem Akuntansi secara terpisah mampu mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa pada beberapa desa di Kabupaten Banggai.
3. Kemudian pada uji parsial, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terpisah juga mampu mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa pada beberapa desa di Kabupaten Banggai.

Saran

1. Untuk mendorong pelaksanaan pengelolaan ADD di sejumlah desa di Kabupaten Banggai, kiranya para pengelola ADD harus mengedepankan pelaksanaan tata kelola dana desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran, untuk itu untuk mendukung hal ini diperlukan pelaksanaan sistem akuntansi yang terintegrasi dengan benar, bahkan untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan, pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada SPIP.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian dengan menambah responden dengan melibatkan seluruh perangkat desa. Disarankan juga untuk menggali dan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa seperti peran perangkat desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliminsyah, Padji. 2005. *Kamus Istilah Akuntansi*. Bandung: Yrama Widya.
- Carls, Warren, M James Reeve & Philips E Fess. 2005. *Accounting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darsono. 2006. *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis : Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*. Jakarta : Diadit Media.
- Diana & Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi : Perancangan, Proses, dan Penerapan*. Edisi I. Yogyakarta : Andi.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Edisi Pertama, Cetakan. Ketujuh. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suwardjono. 2003. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.